

LKjIP 2021

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH



sdabk.bone.go.id



Dinas Sumber Daya Air
& Bina Konstruksi
Kab. Bone



Kata Pengantar

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Sumber Daya Air Dan Bina konstruksi Tahun 2021 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2021.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi Tahun 2021 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun keempat dalam masa RENSTRA Tahun 2019.-2023 LKj Tahun 2021 disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021 yang dijabarkan dari Rencana Strategis (RENSTRA Tahun 2019-2023).

LKj Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2016. Penyusunan LKj Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi Tahun 2021 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi. Komitmen dalam penyusunan LKj Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan LKj Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi Tahun 2021 terdiri atas : Pendahuluan, Perencanaan & Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja dan inovasi dalam skema reformasi birokrasi. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti : latar, maksud, isu strategis, dan struktur serta keragaman sumberdaya manusia di Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi.



Kata Pengantar

Adapun aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, IKU dan PK. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi pada tahun 2021, termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumberdaya.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas-tugas Dinas Sumber Daya Air Tahun 2021 telah banyak membuahkan hasil yang positif. Dari Indikator kinerja utama, terdapat 4 (Empat) indikator yang telah memenuhi target yang ditetapkan. Namun disadari, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan dan mendukung tercapainya good governance pada masa mendatang.

Berkenaan dengan itu, LKj Dinas Sumber Daya Air Tahun 2021 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya. Terima kasih

Watampone, Februari 2022

Kepala Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi

H.A. YUSUF, S.IP, MH
Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19690905 198903 1 005

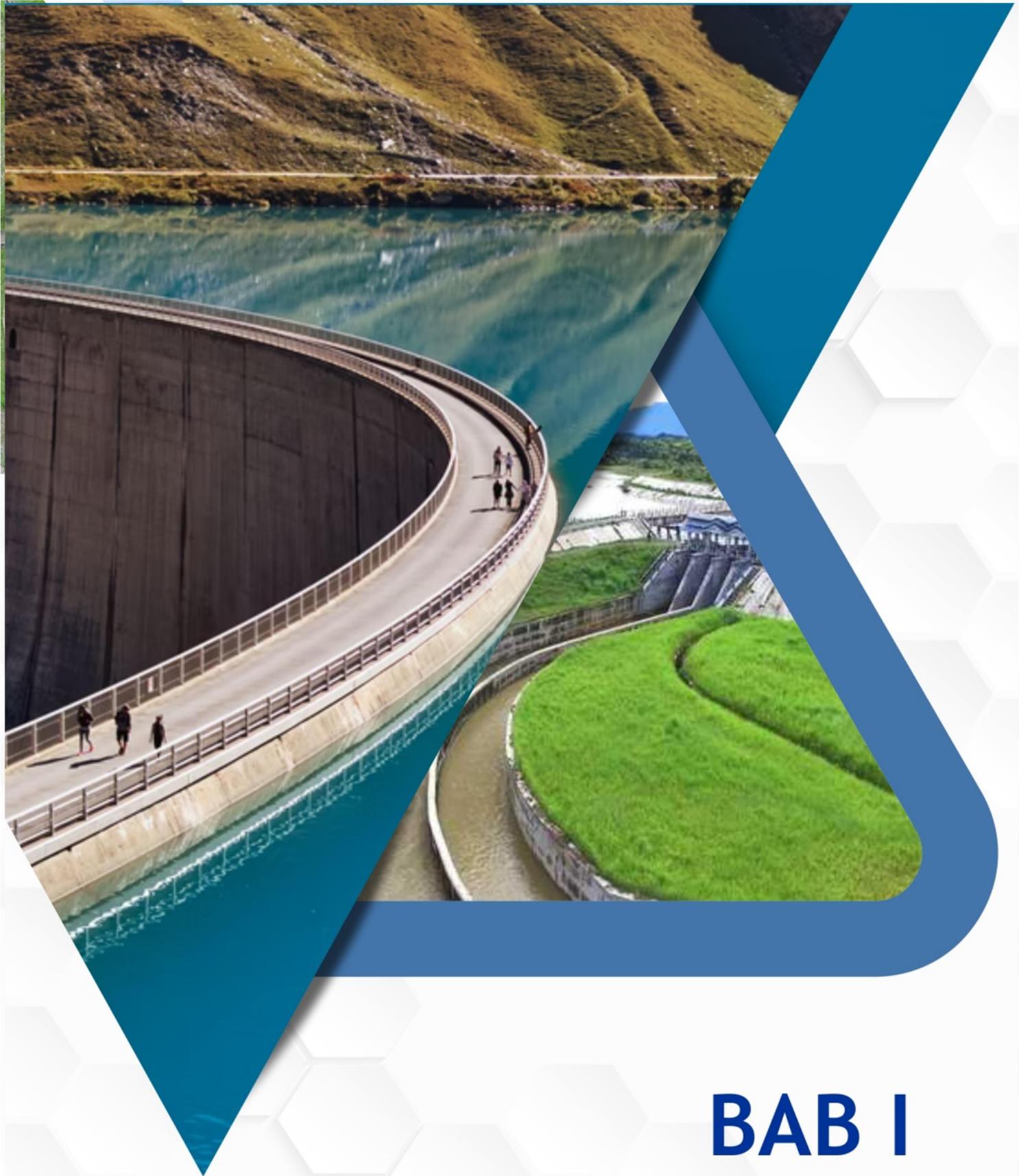
DAFTAR ISI

Bab I 01
PENDAHULUAN

Bab II 10
PERENCANAAN KINERJA

Bab III 18
AKUNTABILITAS KINERJA

Bab IV 42
PENUTUP



BAB I

PENDAHULUAN



BAB I PENDAHULUAN

A. UMUM

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi.

Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Sumber Daya Air Dan Bina konstruksi, LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkandan diwujudkan.



Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, LKj tingkat SKPD disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

LKj Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

LKj Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi merupakan proses untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran yang selanjutnya dianalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

B. ORGANISASI

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi

Mengacu Kepada Peraturan Bupati Kabupaten Bone Nomor 67 Tahun 2021 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Bone maka organisasi Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi Kabupaten Bone mengarahkan kepada Struktur Organisasi pola maksimal.

Organisasi Dinas, terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris dengan 3 Sub Bagian:
 - a. Sub Bagian Program.
 - b. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Kepala Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air dengan 3 Seksi :
 - a. Sub Koordinator Perencanaan Jaringan Sumber Air.
 - b. Sub Koordinator Pembangunan Jaringan Sumber Air.
 - c. Sub Koordinator Pemeliharaan Jaringan Sumber Air.



4. Kepala Bidang Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air, 3 Seksi :
 - a. Sub Koordinator Perencanaan Jaringan Pemanfaatan Air.
 - b. Sub Koordinator Pembangunan Jaringan Pemanfaatan Air.
 - c. Sub Koordinator Rehabilitasi Jaringan Pemanfaatan Air.
5. Kepala Pengelolaan Sumber Daya Air 3 Seksi :
 - a. Sub Koordinator Pemberdayaan Kelembagaan pemanfaat Air.
 - b. Sub Koordinator Operasi Pemeliharaan dan Pendataan Sumber Daya Air .
 - c. Sub Koordinator Pengelolaan Sumber Daya Air Tanah Dalam.
6. Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi 3 Seksi :
 - a. Sub Koordinator Pengaturan Kebijakan Jasa konstruksi.
 - b. Sub Koordinator Pemberdayaan Pelaku Jasa Konstruksi .
 - c. Sub Koordinator Pengendalian dan Pengawasan Jasa Konstruksi.

Sumber Daya Manusia (Kepegawaian)

Dalam menyelenggarakan Tugas Pokok dan fungsi Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi Kabupaten Bone di dukung dengan sumber daya Pegawai Negeri Sipil sebanyak 114 orang yang terdiri dari :

1. Berdasarkan Status Golongan / Kepangkatan

• Golongan IV/c	sebanyak	1	Org
• Golongan IV/b	sebanyak	-	Org
• Golongan IV/a	sebanyak	1	Org
• Golongan III/d	sebanyak	6	Org
• Golongan III/c	sebanyak	14	Org
• Golongan III/b	sebanyak	20	Org
• Golongan III/a	sebanyak	9	Org
• Golongan II/d	sebanyak	30	Org
• Golongan II/c	sebanyak	7	Org
• Golongan II/b	sebanyak	13	Org
• Golongan II/a	sebanyak	5	Org
• Golongan I/d	sebanyak	7	Org
• Golongan I/c	sebanyak	1	Org
• Golongan I/b	sebanyak	-	Org



2. Berdasarkan Tingkat Pendidikan Penjenjangan

- Pendidikan Diklat PIM II sebanyak 1 Org
- Pendidikan Diklat PIM III sebanyak 2 Org
- Pendidikan Diklat PIM IV sebanyak 5 Org

3. Berdasarkan Eselonisasi

- Eselon II/b sebanyak 1 Org
- Eselon III/a sebanyak - Org
- Eselon III/b sebanyak 3 Org
- Eselon IV/a sebanyak 20 Org

4. Berdasarkan Jenis Kelamin

- Laki-laki sebanyak 107 Org
- Perempuan sebanyak 7 Org

Selain sumber daya pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil terdapat juga sumber daya pegawai yang berstatus Non PNS di bawah naungan UPT yang dibiayai dengan Sumber Dana APBN dan APBD sebagai berikut :

1. Tenaga UPT Yang Dibiayai Dana APBN ;

a. UPT Wilayah Palakka

- Tenaga Pengolahan Data sebanyak 5 Org
- Petugas Pintu Air sebanyak 26 Org
- Petugas Saluran sebanyak 19 Org

b. UPT Wilayah Sanrego

- Tenaga Pengolahan Data sebanyak 5 Org
- Petugas Pintu Air sebanyak 31 Org
- Petugas Saluran sebanyak 33 Org

c. UPT Wilayah Ponre-Ponre

- Tenaga Pengolahan Data sebanyak 2 Org
- Petugas Pintu Air sebanyak 28 Org
- Petugas Saluran sebanyak 21 Org

d. UPT Wilayah Pattiro

- Tenaga Pengolahan Data sebanyak 5 Org
- Petugas Pintu Air sebanyak 21 Org



- Petugas Saluran sebanyak 20 Org
- 2. Tenaga UPT Yang Dibiayai Dana APBD ;
 - a. UPT Wilayah Pattiro, Bengo, Unja, Wollangi dan Palakka
 - Tenaga Pengolahan Data sebanyak 7 Org
 - Petugas Pintu Air dan POB sebanyak 21 Org
 - Urusan Operasi sebanyak 5 Org
 - Urusan Pemeliharaan sebanyak 3 Org
 - Urusan Administrasi sebanyak 10 Org

C.ISU STRATEGIS

Adapun isu-isu strategis dari identifikasi masalah dari program-program prioritas Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi sebagai berikut:

1. Masih rendanya kualitas SDM ASN dan atau Non ASN dan manajemen kinerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air secara berkelanjutan.
2. Masih rendanya kualitas perencanaan program, kegiatan dan anggaran, serta pelaporan pertanggung jawaban keuangan/kinerja .
3. Belum Optimalnya layanan Irigasi kewenangan Kabupaten untuk masyarakat/ petani Pemakai air yang diakibatkan umur bangunan yang sudah cukup tua,bendung / kolam mata air sudah rusak,bangunan pelangkap / pembagir usak , bangunan pengambilan dan pembuang air disaluran irigasi sudah banyak kehilangan air/ rusak, Pintu pengatur air sudah tidak layak, tidak adanya fasilitas sarana dan prasarana operasi dan pemeliharaan irigasi, luas layanan irigasi masih kecil, masih terdapat irigasi saluran tanah.
4. Masih banyaknya lokasi yang membutuhkan irigasi baru baik irigasi air permukaan, irigasi air tanah/sumur tanah dalam, dan atau irigasi pompa hidran dalam pemenuhan air baku.
5. Belum adanya pembangunan Saluran dan irigasi tambak yang terdapat di 10 (Sepuluh) kecamatan Pantai di budidaya tambak air payaunya.
6. Belum terfasilitas pengaman pantai dan atau tanggul pantai yang sudah terbangun di daerah-daerah pantai sebagai bagunan pengendali abrasi dan banjir rob yang ada di Kabupaten Bone.
7. Masih rendanya jumlah bangunan pengecegan dan pengedali bencana akibat air di sungai dan anak sungai kabupaten Bone yang memiliki potensi rawan bencana (Banjir, Longsor dan erosi)terhadap pemukiman di Desa/Kelurahan.



8. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membentuk wadah perkumpulan dalam melaksanakan perlindungan asset terbagun melalui operasi dan pemeliharaan irigasi, pantai dan sungai partisipatif.
9. Masih rendahnya pengalokasian anggaran Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi yang sudah terbangun dan untuk keperluan memperpanjang masa pemanfaatan irigasi, sungai dan pantai yang sudah terbangun.
10. Belum terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi stakeholder yang tergabung dalam komisi irigasi kabupaten (ad hoc) dalam menyusun kebijakan dan atau Dokumen pengelolaan dan pemanfaatan sistem irigasi partisipatif (PPSIP, meliputi Sungai dan Pantai).
11. Belum Optimalnya pemberdayaan (Sosialisasi, serasehan/ tuddang sipulung, FGD, pelatihan, Study Tiru) dalam pembentukan dan pembinaan perkumpulan petani pemakai air dengan responsif gender serta penguatan ketahanan air
12. Rendahnya layanan operasional dan peningkatan kualitas SDM ASN dan Non ASN (Pendamping /Penyuluh OP) di 8 (delapan) UPT Pengelolaan Sumber Daya Air.
13. Belum tersaji secara lengkap memadai *database / Baseline data* irigasi permukaan, irigasi air tanah dalam, irigasi tambak, sungai potensi berdampak bencana ke pemukiman , pantai berdampak bencana ke pemukiman dan asset masyarakat.
14. Belum adanya satuan tugas yang melakukan kegiatan pengawasan dan perlindungan asset Irigasi,Sungai,Pantai di kabupaten (POLSUS SDA)
15. Belum tersedia data dan informasi profil tenaga kerja konstruksi di tingkat kabupaten.
16. Belum terlaksananya pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan jasa konstruksi.
17. Rendah sosialisasi, Assement, pembinaan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi kerja tenaga jasa konstruksi dan Pengawasan Keselamatan Kerja konstruksi.
18. Belum terlaksana pengawas, pengendalian, monitoring dan evaluasi tentang penyelenggaraan dan pemanfaatan tenaga jasa konstruksi dan keselamatan kerja konstruksi, sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

D.ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Dalam Upaya usaha peningkatan Kinerja Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi maka dilaksanakan beberapa strategi yaitu :



1. Meningkatkan kualitas manajemen kinerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air secara berkelanjutan.
2. Meningkatkan kualitas perencanaan program, kegiatan dan anggaran, serta pelaporan pertanggung jawaban keuangan/kinerja.
3. Mengoptimalkan layanan Irigasi kewenangan Kabupaten untuk masyarakat/ petani Pemakai air yang diakibatkan umur bangunan yang sudah cukup tua, bendung / kolam air sudah rusak, bangunan pelangkap pembagi, bangunan pengambilan dan pembuang air disaluran irigasi sudah banyak kehilangan air/ rusak, Pintu pengatur air sudah tidak layak, tidak adanya fasilitasi sarana dan prasarana operasi dan pemeliharaan irigasi, luas layanan irigasi masih kecil, masih terdapat irigasi saluran tanah dilihat dari rasio irigasi dalam kondisi baik.
4. Meningkatkan bangun Irigasi Baru pada lokasi persawahan tadah hujan dan air baku yang masih membutuhkan irigasi baru baik irigasi air permukaan, irigasi air tanah/sumur tanah dalam, dan atau irigasi pompa hidran.
5. Menlaksana pembangunan Saluran dan irigasi tambak yang terdapat di 10 (Sepuluh) kecamatan Pantai di budidaya tambak air payaunya.
6. Menyediakan fasilitas pengaman pantai dan atau tanggul pantai yang sudah terbangun di daerah-daerah pantai sebagai bagunan pengendali abrasi dan banjir rob yang ada di Kabupaten Bone.
7. Menyediakan bangunan pengecegan dan pengedali bencana akibat air di sungai dan anak sungai kabupaten Bone yang memiliki potensi rawan bencana (Banjir, Longsor dan erosi) terhadap pemukiman di Desa/Kelurahan.
8. Mewujudkan kesadaran masyarakat dalam membentuk wadah perkumpulan dalam melaksanakan perlindungan asset terbangun melalui operasi dan pemeliharaan irigasi, pantai dan sungai partisipatif.
9. Menyediakan pengalokasian anggaran Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi yang sudah terbangun dan untuk keperluan memperpanjang masa pemanfaatan irigasi, sungai dan pantai yang sudah terbangun.
10. Melaksanakan Koordinasi dan sikronisasi stakeholder yang tergabung dalam komisi irigasi kabupaten (ad hoc) dalam menyusun kebijakan dan atau Dokumen pengelolaan dan pemanfaatan sistem irigasi partisipatif (PPSIP, meliputi Sungai dan Pantai.
11. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan (Sosialisasi, serasehan/



tuddang sipulung, FGD, pelatihan, Study Tiru) dalam pembentukan dan pembinaan perkumpulan petani pemakai air dengan responsif gender serta penguatan ketahanan air

12. Meningkatkan layanan operasional dan peningkatan kualitas SDM ASN dan Non ASN (Pendamping /Penyuluh OP) 8 (delapan) UPT Pengelolaan Sumber Daya Air.
13. Menyediakan *database / Baseline data* irigasi permukaan, irigasi air tanah dalam, irigasi tambak, sungai potensi berdampak bencana ke pemukiman , pantai berdampak bencana ke pemukiman dan asset masyarakat yang memadai.
14. Menyediakaa satuan tugas yang melakukan kegiatan pengawasan dan perlindungan asset Irigasi,Sungai,Pantai di kabupaten (POL SUS SDA)
15. Menyedaiakan data dan informasi profil tenaga kerja konstruksi di tingkat kabupaten.
16. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan jasa konstruksi.
17. Mengoptimalkan sosialisasi, Assement, pembinaan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi kerja tenaga jasa konstruksi dan Pengawsan Keselamatan Kerja konstruksi.
18. Melaksanakan pengawas, pengendalian,monitoring dan evaluasi tentang penyelenggaraan dan pemanfaatan tenaga jasa konstruksi dan keselamatan kerja konstruksi, sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku.



BAB II PERENCANAAN KINERJA



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. TUJUAN DAN SASARAN

Kabupaten Bone mencetuskan visi dengan terjalannya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan seluruh stakeholder dalam merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Bone secara komprehensif, sehingga ditetapkan visi Kabupaten Bone Tahun 2018-2023, yaitu:

“Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera”

Sebagai upaya dalam mewujudkan visi Kabupaten Bone maka dirumuskan dalam 6 (enam) misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
2. Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
3. Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya.
4. Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.
5. Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik.
6. Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.

Adapun misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi adalah misi ke-1 (satu) yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan misi ke-4 (empat) yaitu mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Tahun 2018-2023.

Untuk misi ke-1 (satu), tujuan RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 yang terkait dengan Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi adalah tujuan ke-1 (satu) yakni mengembangkan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dengan sasaran



membaiiknya pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan, yang diukur dengan indikator nilai SAKIP dengan target peningkatan dari Predikat C di tahun dasar RPJMD (2017) menjadi Predikat B di tahun akhir RPJMD (2023).

Untuk misi ke-2 (dua), tujuan RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 yang terkait dengan Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi adalah adalah tujuan ke-2 (dua) yakni mengembangkan infrastruktur dasar, dengan sasaran meningkatnya kualitas infrastruktur dan layanan sumber daya air dan Tersedianya tenaga konstruksi yang bersertifikat dan pengendalian K3, yang diukur dengan empat indikator kinerja utama sebagaimana yang akan dijabarkan dalam pembahasan selanjutnya.

Untuk merealisasikan misi, tujuan serta sasaran RPJMD tersebut ditetapkanlah tujuan dan sasaran Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Kabupaten Bone dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Kabupaten Bone. Sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

Tabel 2.1. Matriks Tujuan Dan Sararan Renstra Perubahan 2018-2023



NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	CC	B	B	BB	BB	A
	Menurunnya daerah terdampak banjir melalui peningkatan kinerja bangunan pengaman.	Persentase panjang garis pantai rawan bencana yang telah dilengkapi bangunan pengaman (Persen)	5	10	15	20	25	30
		Persentase bantaran sungai rawan longsor yang sudah dilengkapi dengan bangunan proteksi tebing(Persen)	5	20	40	60	70	80
		Persentase sungai yang mengalami pendangkalan yang sudah dinormalisasi (Persen)	5	20	40	60	70	80
	Meningkatnya ketahanan air yang menunjang pemenuhan kebutuhan daerah irigasi.	Persentase peningkatan bangunan pengambilan air baru (Persen) (IKU).	20	30	40	50	60	70
		Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik (Persen) (IKU).	78,10	79,48	80,86	82,24	83,62	85
		Rasio jaringan irigasi (M/Ha) (IKU).	4.30	4.68	5.05	5,44	5.83	6.21
2	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dan layanan Sumber Daya Air	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota (Persen)(IKU).	61	62	63	64	65	66
		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi,erosi,dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan Kab/Kota(Persen)(IKU)	7,50	8,00	8,50	9,00	9,50	10
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi (Persen)(IKU)	30	40	50	60	80	85
	Meningkatnya Tenaga Jasa Konstruksi	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis terampil konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi (Persen) (IKU).	55	60	65	70	75	80

CAT *

- Tujuan dan Sasaran beserta indikator lama
- Tujuan dan Sasaran beserta indikator Baru

Sumber Data : Renstra Perubahan Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi Tahun 2018-2023

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. STRATEGI

Guna mewujudkan pencapaian misi ke-1 (satu) Pemerintah Kabupaten Bone, yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan pencapaian misi ke-2 (dua) yaitu mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, maka diperlukan strategi yang terimplementasi dalam arah kebijakan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi untuk dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan.



2. ARAH KEBIJAKAN

Jika dikelompokkan maka setidaknya terdapat 12 (dua belas) arah kebijakan yang akan ditempuh oleh Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Kabupaten Bone dalam mewujudkan 8 (delapan) strategi dari pencapaian 5 (Lima) sasaran dalam rangka menuju 2 (dua) tujuan Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Tahun 2018-2023 ini.

Ringkasan strategi dan arah kebijakan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Kabupaten Bone dalam 5 (lima) tahun ke depan terangkum dalam Tabel.2.2.

Tabel 2.2 Tujuan , Sasaran, Strategi, Dan Arah Kebijakan Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi

Visi : Masyarakat Bone yang mandiri, berdaya saing dan sejahtera					
Misi Ke-1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).					
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi perangkat daerah.	1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi	1. Meningkatkan kualitas manajemen kinerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air secara berkelanjutan.	1. Penyediaan pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai.		
		2. Meningkatkan kualitas perencanaan program, kegiatan dan anggaran, serta pelaporan pertanggung jawaban keuangan/kinerja.	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara yang berintegritas .		
			1. Peningkatan konsistensi/keselarasan perencanaan program, kegiatan dan anggaran serta pelaporan pertanggungjawaban (Renstra, Renja, RKA, DPA/DPPA, SPJ dan LKJIP).		
Misi Ke-2 : Mengembangkan Kemandirian Ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat					
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
2. Meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan	1. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dan layanan Sumber Daya Air	1. Mewujudkan ketersediaan data daerah rawan banjir yang aktual dan berkesinambungan.	1. Pemenuhan kebutuhan akan database sungai dan pantai.		
		2. Mengoptimalkan fungsi dan kinerja sarana dan prasarana pengendali banjir (alami maupun buatan).	2. Pelaksanaan evaluasi dan monitoring secara periodik terhadap pencapaian sasaran.		
		3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pengendalian banjir.	1. Pembangunan sarana dan prasarana pengendali banjir yang dibutuhkan.		
		4. Mewujudkan ketersediaan data daerah irigasi dan fasilitas penunjangnya yang aktual dan berkesinambungan.	2. Pemeliharaan sarana dan prasarana pengendali banjir agar fungsinya tetap baik.		
		5. Mengoptimalkan fungsi dan kinerja sarana dan prasarana daerah irigasi dan fasilitas penunjangnya.	1. Pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan.		
		6. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan ketahanan air untuk pemenuhan kebutuhan daerah irigasi.	2. Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan partisipatif.		
	2. Tersedianya Tenaga Jasa Konstruksi	1. Mengoptimalkan pelatihan tenaga jasa konstruksi	1. Mewujudkan ketersediaan data daerah irigasi dan fasilitas penunjangnya yang aktual dan berkesinambungan.	1. Pemenuhan kebutuhan akan database irigasi (permukaan, pompa, air tanah dan tambak) dan database bangunan pengambilan air dan konservasi.	
			2. Mengoptimalkan pelatihan dan pengawasan K3	2. Pelaksanaan evaluasi dan monitoring secara periodik terhadap pencapaian sasaran.	
				1. Mewujudkan ketersediaan data daerah irigasi dan fasilitas penunjangnya yang aktual dan berkesinambungan.	1. Pemenuhan kebutuhan akan database irigasi (permukaan, pompa, air tanah dan tambak) dan database bangunan pengambilan air dan konservasi.
				2. Mengoptimalkan pelatihan dan pengawasan K3	2. Pelaksanaan evaluasi dan monitoring secara periodik terhadap pencapaian sasaran.
					1. Pembangunan sarana dan prasarana irigasi dan bangunan pengambilan/konservasi air yang dibutuhkan.
					2. Pemeliharaan sarana dan prasarana sarana dan prasarana irigasi dan bangunan pengambilan/konservasi air agar fungsinya tetap baik.
		1. Pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan.	1. Pemenuhan kebutuhan tenaga K3		
		2. Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan partisipatif.	2. Membangun dan memelihara Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja		

Sumber Data : Renstra Perubahan Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi Tahun 2018-2023

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA

IKU adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama.

Indikator Kinerja Utama Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bone Nomor 101 Tahun 2021

Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Nomor 87 Tahun 2018
Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bone.

**Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama
Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi**

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	CC	B	B	BB	BB	A
2	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dan layanan Sumber Daya Air	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota (Persen)(IKU).	61	62	63	64	65	66
		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi,erosi,dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan Kab/Kota(Persen)(IKU)	7,50	8,00	8,50	9,00	9,50	10
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi (Persen)(IKU)	30	40	50	60	80	85
	Meningkatnya Tenaga Jasa Konstruksi	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis terampil konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi (Persen) (IKU).	55	60	65	70	75	80

Sumber Data : Renstra Perubahan Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi Tahun 2018-2023

D. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan PK 2021 dilakukan dengan mengacu kepada RENSTRA, RENCANA KERJA (RENJA) 2021, IKU dan APBD. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air. telah menetapkan PK sebagai berikut:

**Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja
Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi**

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	BB	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.014.902.035
2	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dan layanan Sumber Daya Air	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota (Persen)	64	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	17.726.325.700
		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi,erosi,dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan Kab/Kota(Persen)	9,00		
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi (Persen)	60		
3	Meningkatnya Tenaga Jasa Konstruksi	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis terampil konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi (Persen)	70	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	
JUMLAH					30.741.227.735

Sumber Data : Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi

E. STANDAR PENILAIAN KINERJA

Pengukuran Kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Standar Penilaian Kinerja terhadap laporan kinerja perangkat daerah merupakan tolak ukur keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan



kebijakan teknis, program, kegiatan dan sub kegiatan. Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi Kab. Bone maka telah ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 2.5 Standar Penilaian Kinerja
Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi**

Nilai %	Pencapaian
110 ke atas	Sangat tercapai/Sangat berhasil
$90 \leq x < 110$	Tercapai/Berhasil
$60 \leq x < 90$	Cukup tercapai/Cukup berhasil
$x < 60$	Tidak tercapai/Tidak berhasil

Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase capaian target indikator kinerja adalah:

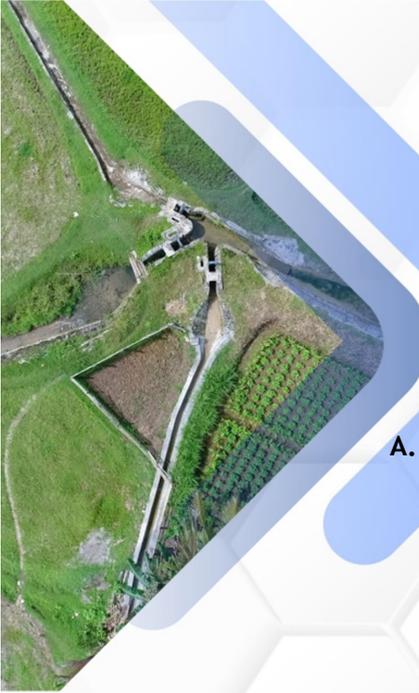
$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \text{Realisasi/Target} \times 100\%$$



BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah merupakan media pertanggungjawaban suatu Instansi Pemerintah atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran berdasarkan kewenangan yang dimiliki. Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi selaku pengembang amanah untuk melaksanakan kewajiban mewujudkan akuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bone yang disusun dan dibuat sesuai ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan melalui pelaksanaan program kerja sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Sementara untuk Pengukuran Capaian Kinerja digunakan sebagai penilaian atas keberhasilan/kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bone.

Laporan tersebut memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program / kegiatan baik keberhasilan kinerja yang dicapai maupun kegagalan pada Tahun 2021. Pengumpulan data Kinerja dilakukan secara berjejang dari bagian perangkat daerah penanggung jawab wilayah kerja hingga top leader (eselon II) dengan Output hasil pelaksanaan kegiatan. Untuk mengetahui gambaran tingkat pencapaian kinerja sasaran, program dan kegiatan dapat dilakukan melalui media pengukuran kinerja yang akan diperbandingkan Perjanjian kinerja dengan realisasi kinerja. Dalam melakukan evaluasi keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja setiap sasaran.

Capaian Indikator Kinerja Tujuan/sasaran atas perjanjian Kinerja diatas mengacu pada Tujuan/Sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi meliputi :



Tujuan 1:

Meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi perangkat daerah

Sasaran 1.1

Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi

- ⇒ Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP

Tujuan 2:

Meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan

- ⇒ Indeks Layanan Infrastruktur

Sasaran 2

Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dan layanan Sumber Daya Air

- ⇒ Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota
- ⇒ Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi,erosi,dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan Kab/Kota
- ⇒ Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi kondisi baik.

Sasaran 3

Meningkatnya Tenaga Jasa Konstruksi

- ⇒ Rasio tenaga operator/teknisi/analisis terampil konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi
- ⇒ Rasio Proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi

Untuk setiap pernyataan kinerja tujuan/sasaran strategis tersebut di atas dilakukan analisis capaian kinerja tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 3.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KETERANGAN
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	BB	BB	100	Mencapai Target
2	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dan layanan Sumber Daya Air	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota (Persen)(IKU).	64	64,32	100,5	Melampaui Target
		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi,erosi,dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan	9	9,1	101,11	Melampaui Target
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi (Persen)(IKU)	60	70,22	117,03	Melampaui Target
3	Meningkatnya Tenaga Jasa Konstruksi	Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis terampil konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi	70	73,14	104,49	Melampaui Target
		Rasio Proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100	100	100,00	Mencapai Target
Rata-Rata					103,86	Melampaui Target

Sumber Data : Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi Tahun 2021

Berdasarkan data di atas, capaian antara target dan realisasi untuk indikator pertama mencapai target dan capaian antara target dan realisasi pada indikator kedua telah melampaui target sedangkan capaian antara target dan realisasi untuk indikator ketiga telah melampaui target dan mencapai target jadi apabila di rata-rata capaian antara target dan realisasi secara keseluruhan yang terdiri dari 3 indikator kinerja sebesar 103,86 melampaui target.



2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018-2023

Tahun 2021 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi 2018 - 2023. Adapun realisasi dan capaian kinerja Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, diperoleh matrik sebagai berikut:

Tabel 3.2 Realisasi Kinerja Tahun 2018-2021

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	REALISASI 2021			Capaian Kinerja			KETERANGAN
				2019	2020	2021	2019	2020	2021	
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Sumber Daya Air	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	CC	B	B	BB	100	100	100	Mencapai Target
	Menurunkan daerah terdampak banjir melalui peningkatan kinerja bangunan pengaman.	Persentase panjang garis pantai rawan bencana yang telah dilengkapi bangunan pengaman (Persen)	5	11,2	11,2		112	74,67		
		Persentase bantaran sungai rawan longsor yang sudah dilengkapi dengan bangunan proteksi tebing(Persen)	5	46,91	51,2		234,55	128		
		Persentase sungai yang mengalami pendangkalan yang sudah dinormalisasi (Persen)	5	68,01	68,01		340,05	170,02		
	Meningkatnya ketahanan air yang menunjang pemenuhan kebutuhan daerah irigasi.	Persentase peningkatan bangunan pengambilan air baru (Persen) (IKU).	20	50	50	-	166,67	125		
		Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik (Persen) (IKU).	78,10	79,05	80,87		99,46	100,01		
		Rasio jaringan irigasi (M/Ha) (IKU).	4,30	4,31	4,51		92,09	89,31		
2		Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota (Persen)(IKU).	41,30	57,46	59,61	64,32	287,3	149,01	100,5	Melampaui Target
	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dan layanan Sumber Daya Air	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi,erosi,dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan Kab/Kota(Persen)(IKU)	9	11,2	11,2	9,1	112	74,67	101,11	Mencapai Target
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi (Persen)(IKU)	25	79,05	80,87	70,22	99,46	100,01	117,03	Melampaui Target
	Meningkatnya Tenaga Jasa Konstruksi	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis terampil konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi (Persen) (IKU).	0			73,14	0	0	104,49	Melampaui Target
3		Rasio Proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	0			100	0	0	100	Mencapai Target
Rata-Rata							99,79	70,62	103,86	Mencapai Target

CAT *

- Realisasi Tujuan dan Sasaran beserta indikator lama
- Realisasi Tujuan dan Sasaran beserta indikator Baru
- Realisasi Mapping Tujuan,Sasaran dan Indikator Lama Ke Baru

Sumber Data : Dinas Sumber Daya Air Tahun 2021



Berdasarkan data di atas, dapat dijelaskan bahwa rata-rata capaian antara target dan realisasi untuk indikator pertama hasil evaluasi sakip untuk tahun 2019 ,2020 dan 2021 Telah mencapai target dengan penjelasan sebagai berikut:

Tujuan 1:

Meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi perangkat daerah

Sasaran 1.1

Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi

- ⇒ Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP

Berdasarkan data di atas, dapat dijelaskan bahwa rata-rata capaian antara target dan realisasi untuk indikator pertama hasil evaluasi sakip untuk tahun 2019 ,2020, 2021 Telah mencapai target dan dengan penjelasan sebagai berikut:

Tujuan 2:

Meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan

- ⇒ Indeks Layanan Infrastruktur

Sasaran 2

Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dan layanan Sumber Daya Air

- ⇒ Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota
- ⇒ Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi,erosi,dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan Kab/Kota
- ⇒ Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi .

Berdasarkan data di atas, dapat dijelaskan bahwa indicator kinerja lama untuk tahun 2019 dan 2020 rata-rata capaian telah melampaui target dan setelah di mapping antara indicator kinerja lama dengan indicator kinerja baru untuk tahun 2019,2020 dan 2021 rata-rata capaian antara target dengan realisasi sebesar 91.42 telah mencapai target dengan penjelasan sebagai berikut:

Tujuan 2:

Meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan

- ⇒ Indeks Layanan Infrastruktur



Sasaran 3

Meningkatnya Tenaga Jasa Konstruksi

- ⇒ Rasio tenaga operator/teknisi/analisis terampil konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi
- ⇒ Rasio Proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi

Berdasarkan data diatas paaada atahun 2019 dan 2020 indikator tersebut masih di ampuh oleh Dinas PU dan penataan Ruang sehingga Dinas Sumber Daya Air hanya dapat mengukur capaian kinerja pada tahun 2021 dengan rata-rata capaian 102.25% telah melampauai target.

3. Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja tujuan/sasaran adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah sebagaimana tercantum pada Rencana Strategis Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi Tahun 2018 - 2023 seperti dalam tabel di bawah ini:

Tabel 8.1 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan target Jangka Menengah Renstra 2018 -2023

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET JANGKA MENENGAH	REALISASI KINERJA				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Sumber Daya Air	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	A	B	B	BB		
2	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dan layanan Sumber Daya Air	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	66	57,46	59,61	64,32		
		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi,erosi,dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan Kab/Kota	10	11,20	11,20	9,10		
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	85	79,05	80,87	70,22		
3	Meningkatnya Tenaga Jasa Konstruksi	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis terampil konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi	80	-	-	73,14		
		Rasio Proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100	-	-	100,00		

Sumber Data : Renstra Perubahan 2018-2023 Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi

Berdasarkan data di atas, dapat dijelaskan bahwa rata-rata capaian antara target dan realisasi untuk indikator pertama hasil evaluasi sakip untuk tahun 2019 ,2020 dan 2021 telah mencapai target, sedangkan untuk sasaran indikator kedua untuk tahun 2019,2020,dan 2021 telah melampaui target sedangkan sasaran indicator tiga untuk tahun 2019 dan 2020 Realisasinya Tidak ada dikarenakan pada tahun



tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sedangkan pada tahun 2021 telah melampaui target dan mencapai target dan telah mencapai target dan melampaui target pada persentase target jangka menengah Renstra Perubahan Tahun 2018-2023.

4. Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional Lainnya

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja tujuan/sasaran strategis adalah dengan membandingkan realisasi kinerja indikator tujuan/sasaran strategis Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi dengan target dan realisasi standar pelayanan minimal/standar nasional sebagaimana tabel berikut:

Tabel. 9.1 Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA 2021	STANDAR NASIONAL	
				TARGET 2021	REALISASI 2021
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Sumber Daya Air	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	BB		
2	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dan layanan Sumber Daya Air	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	64,32		
		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi,erosi,dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan Kab/Kota	9,10		
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	70,22		
3	Meningkatnya Tenaga Jasa Konstruksi	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis terampil konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi	73,14		
		Rasio Proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100		

Sumber Data : Renstra Perubahan 2018-2023 Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi



Berdasarkan data di atas, dapat dijelaskan bahwa rata-rata capaian realisasi untuk indikator pertama Telah mencapai target, sasaran indikator kedua telah melampaui target sedangkan indicator ketiga telah melampaui target dan mencapai target dengan presentase melampaui persentase Target jangka menengah Renstra 2018-2023.

5. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Untuk menganalisa keberhasilan atau kegagalan indikator kinerja dalam rangka pencapaian tujuan/sasaran strategis Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi dapat kita lihat tabel ikhtisar pencapaian capaian kinerja sebagai berikut

Tabel. 10.1 Analisa Penyebab Keberhasila/Kegagalan

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	RATA-RATA CAPAIAN	Predikat			
					>110	90=<s/d<110	60=<s/d<90	<60
					Sangat Berhasil	Berhasil	Cukup Berhasil	Tidak Berhasil
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Sumber Daya Air	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	100%	BB		√	σ	
2	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dan layanan Sumber Daya Air	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	100,5	89,54			√	
		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi,erosi,dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan Kab/Kota	101,11	107,31		√		
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	117,03	122,7	√			
3	Meningkatnya Tenaga Jasa Konstruksi	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis terampil konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi	73,14	100%		√		
		Rasio Proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100	100		√		

Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa secara umum realisasi capaian indikator tujuan/sasaran strategis Dinas



Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi tahun 2021 dalam kategori Berhasil dan berhasil dengan Rata -Rata Capaian 103,86%.

Analisa penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja sasaran strategis dijelaskan sebagai berikut:

Tujuan 1:

Meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi perangkat daerah

Sasaran 1.1

Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi

⇒ Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP

Dari table di atas, terlihat bahwa pencapaian tujuan Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi dengan indikator Hasil Evaluasi Sakip Oleh APIP .menunjukkan predikat Berhasil yang mempunyai nilai capain rata-rata BB yang didukung oleh sasaran dengan jumlah indikator kinerja BB yang menunjukkan predikat Berhasil yaitu mempunyai nilai capaian rata-rata BB.

Sedangkan pada tujuan Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dan layanan Sumber Daya Air dalam kategori berhasil yang Berhasil yang mempunyai nilai capain rata-rata 106,52 % yang didukung oleh sasaran indicator kinerja dengan nilai 89,54 ,107,31 dan 122,70 predikat rata-rata Berhasil. Sedangkan tujuan sasaran ketiga Meningkatnya Tenaga Jasa Konstruksi dalam kategori rata-rata berhasil yang mempunyai nilai 100 dengan indicator kinerja dengan nilai 100.

Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja sebagai berikut:

Penyebab Keberhasilan :

- a. Realisasi Pekerjaan Fisik dan Non Fisik secara keseluruhan telah mencapai 99%
- b. Mengoptimalkan Sarana Prasarana yang tersedia
- c. Pemberdayaan SDM yang ada di Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi berjalan baik
- d. Koordinasi Dinas dengan 8 UPT berjalan Dengan Baik

Penyebab Kegagalan:

- a. Kurang Optimalnya penggunaan Anggaran Tahun 2021 dengan penyerapan anggaran mencapai 78,22 % dengan predikat Kinerja cukup berhasil, disebabkan Adanya Harga Satuan yang tidak bisa berubah yang berasal dari sisa tender yang tidak dapat dialokasi ke kegiatan yang lain;



- b. Semua kegiatan pengadaan barang dan jasa dilakukan diUKPBJ, dan harus menungguh antrian dalam mendapatkan layanan dari UKPBJ;
- c. Jumlah personil Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi secara kualitas dan kuantitas masih kurang memadai, serta kurangnya SDM yang menguasai secara teknis;
- d. Informasi dan pemantauan Pelaksanaan Kegiatan sangat terhambat, disebabkan jarang tempuh ke lokasi pembangunan sangat jauh sangat tidak sebanding biaya transport yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah

Solusi yang telah dilakukan atau Langkah langkah yang diambil untuk mengatasi kendala dan hambatan adalah sebagai berikut:

- a. Mengusulkan penambahan anggaran;
- b. Meningkatkan kualitas SDM dengan, diikutkan diklat teknis;
- c. Mengusulkan penambahan pegawai sesuai kualifikasi yang dibutuhkan;
- d. Mengusulkan Pengadaan kendaraan operasional, sarana dan prasarana demi kelancaran Operasional organisasi Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Sumber daya yang dimiliki Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2021 untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Berikut tabel untuk menganalisis efisiensi sumber daya Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan:

Tabel. 11.1 Analisa atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kinerja			Anggaran			Efisiensi Sumber Daya %
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	
	a	b	c	d	e (d/c x100%)	f	g	h (g/f x 100%)	i (e-h)
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Sumber Daya Air	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	BB	BB	100	Rp11.482.643.793	Rp10.173.705.351	88,60	11,4
2	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dan layanan Sumber Daya Air	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	64	64,32	100,5	Rp. 1.675.004.220	Rp. 1.664.235.000	99,36	1,14
		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi,erosi,dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan Kab/Kota	9	9,10	101,11	-	-	-	101,11
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	60	70,22	117,03	Rp. 11.250.191.355	Rp. 8.933.955.220	79,41	37,62
3	Meningkatnya Tenaga Jasa Konstruksi	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis terampil konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi	70	73,14	104,49	-	-	-	104,49
		Rasio Proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100	100	100,00	Rp. 15.403.495.735	Rp. 12.652.282.770	82,14	17,86

Sumber Data : Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi Tahun 2021

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yaitu perbandingan antara kinerja dengan anggaran, maka dapat dilihat bahwa pada pelaksanaan kegiatan Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi terdapat efisiensi anggaran dan efektivitas penggunaan dana berdasarkan kinerja yaitu:



1. Indikator Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP dengan capaian kinerja 100 % dan capaian anggaran 88.60%, dengan efisien penggunaan sumber daya sebesar (11,4%).
2. Indikator Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota dengan capaian kinerja 100.5% dan capaian anggaran 99.36% dengan efisien penggunaan sumber daya sebesar 1.14%.
3. Indikator Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi,erosi,dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan Kab/Kota dengan capaian kinerja 101.11% dan capaian anggaran 0% dengan efisien penggunaan sumber daya sebesar 101.11%.
4. Indikator Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi dengan capaian kinerja 117.03% dan capaian anggaran 79.41% dengan efisien penggunaan sumber daya sebesar 37.62%.
5. Indikator Rasio tenaga operator/teknisi/analisis terampil konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi dengan capaian kinerja 104.49% dan capaian anggaran 0% dengan efisien penggunaan sumber daya sebesar 104.49%.
6. Indikator Rasio Proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi dengan capaian kinerja 100% dan capaian anggaran 82.14% dengan efisien penggunaan sumber daya sebesar 17.86%.

7. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Analisis terhadap program/kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi sebagai berikut:

Tabel 12.1 Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan /Kegagalan Pencapaian Kinerja

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN %	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT/OUTPUT	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	RENCANA TINDAK LANJUT
			Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar					
			Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang		100	99.00	99.00	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan realisasi pelaksanaan seluruh kegiatan pendukung program penunjang urusan pemerintahan daerah yang telah direncanakan	100%	100%	100%	
			Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan realisasi penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah (Persen)	100%	100%	100%	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun tepat waktu	5	5	5	
			Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Frekuensi pelaksanaan koordinasi untuk penyusunan dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD tepat waktu	4	4	4	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan realisasi pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah (Persen)	100%	100%	100%	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan bulanan tepat waktu (Orang)	117	117	117	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan realisasi pelaksanaan administrasi kepegawaian pada perangkat daerah (Persen)	100%	-	-	
			Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (Orang)	100	-	-	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan realisasi pelaksanaan administrasi umum pada perangkat daerah (Persen)	100%	100%	100%	
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	1	1	1	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Paket)	2	2	2	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan (Paket)	2	2	2	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Paket)	3	3	3	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	2	2	2	



		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (Buah)	8	8	8	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti dan atau diselenggarakan (Kali)	60	45	45	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan realisasi penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	100%	100%	100%	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (Rekening)	36	36	36	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa pelayanan Umum Kantor yang disediakan	46	42	42	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan realisasi barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara (Persen)	100%	100%	100%	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan (Tagihan)	4	4	4	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	21	21	21	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	1	1	1	
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	1. Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota 2. Persentase luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan Kab/Kota 3. Persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	1. 64% ; 2. 99% ; 3. 60%	1. 64,32 % ; 2. 99% ; 3. 63,73%	1. 64,32 % ; 2. 99% ; 3. 63,73%	
		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah	Persentase Luas kawasan permukiman dan kawasan produktif sepanjang pantai yang rawan abrasi,	64%	64,32	64,32	Kegiatan Rehabilitasi Tanggul Sungai dan Pengaman Pantai dapat dimaksimalkan serta kegiatan pembentukan dan pembinaan PSA
		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah dokumen rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk Konstruksi Air Baku yang tersusun (Dokumen)	2	2	2	
		Pembangunan Sumur Air Tanah Untuk Air Baku	Jumlah sumur air tanah untuk air baku yang terbangun (Buah)	5	3	3	
		Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang tanggul sungai yang direhabilitasi (Km)	1	0,793	0,793	
		Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	Jumlah infrastruktur perlindungan mata air yang terbangun dan terpelihara (Buah)	2	2	2	
		Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kelembagaan perkumpulan petani pemakai air (P3A/GP3A/IP3A) irigasi dan lembaga pengelola SDA lainnya yang terbentuk, terbina dan terberdayakan (Lembaga)	50	39	39	
		Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil evaluasi dan rekomendasi teknis pemanfaatan air tanah dalam yang tersusun (Buah)	1	1	1	
		Koordinasi dan Sinkronisasi peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan SDA kewenangan kabupaten/kota	Frekuensi pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi untuk peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan SDA kewenangan kabupaten (P3A/GP3A/IP3A)	50	39	39	



		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha dalam (satu) Daerah Kabupaten/kota	1. Panjang jaringan irigasi primer dan sekunder yang terbangun dan termanfaatkan (Km) 2. Jumlah bangunan utama yang terbangun dan termanfaatkan (Unit)	11	10.8	10.8	Dihaarkan tahun selanjutnya sudah .menyentuh Kegiatan Pemeliharaan sehingga IKU irigasi Baik dapat terwujud
		Penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah dokumen rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk pembangunan konstruksi irigasi yang tersusun (Buah).	3	3	3	
		Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan (primer dan sekunder) yang telah terbangun (Km).	1	0.786	0.786	
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan (primer dan sekunder) terbangun yang telah direhabilitasi akibat kerusakan berat (Km).	10	10	10	
		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan (primer dan sekunder) terbangun yang memiliki kinerja baik (Km).	0%	0%	0%	
		Operasi Unit Pengelola Irigasi	Jumlah Unit Pengelola Teknis Pengelolaan Sumber Daya Air (UPT PSDA) Wilayah yang terpenuhi kebutuhan operasional kerjanya (UPT PSDA Wilayah).	8	8	8	
		Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Jumlah Daerah Irigasi yang dikelola dan diawasi pengalokasian airnya (DI).	50	39	39	

Sumber Data : Laporan LPDD Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas tentang analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja, disampaikan hal sebagai berikut:

Tujuan 1: Meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi perangkat daerah

Sasaran 1.1: Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi.

Indikator 1.1.1: Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP

dengan target 100% telah Berhasil tercapai sebesar 88.60% atau tercapai 88.60%. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program:

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Upaya Perbaikan Berikutnya :

Berdasarkan hasil evaluasi program kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi pada tahun 2021 dengan melalui 6 analisa kegiatan capaian kinerja sebagaimana



tersebut diatas, ada beberapa upaya perbaikan yang harus dilakukan untuk pencapain kinerja tahun berikutnya, yaitu

Tujuan 1: Meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan

Sasaran 1.1: Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi.

Indikator 1.1.1: Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP

1. Pengalokasian anggaran pada sub kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi.
2. Mengusulkan tambahan kendaraan operasional, sarana dan prasarana demi kelancaran Kegiatan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi.

Tujuan 2: Meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan

Sasaran 2.1 : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dan layanan Sumber Daya Air

Indikator 3.1.1 : Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota

Indikator 3.1.2 : Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi,erosi,dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan Kab/Kota

Indikator 3.1.3 : Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi

dengan target 100% telah Berhasil tercapai sebesar 81.33% atau tercapai 81.33%. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program:

- Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Upaya Perbaikan Berikutnya :

Berdasarkan hasil evaluasi program kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi pada tahun 2021 dengan melalui 2 analisa kegiatan capaian kinerja sebagaimana tersebut diatas, ada beberapa upaya perbaikan yang harus dilakukan untuk pencapain kinerja tahun berikutnya, yaitu

Tujuan 2: Meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan

Sasaran 2.1 : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dan layanan Sumber Daya Air



Indikator 2.1.1 : Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota

Indikator 2.1.2 : Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi,erosi,dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan Kab/Kota

Indikator 2.1.3 : Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi

1. Pengalokasian Anggaran yang maksimal terutama yang mendukung peningkatan Indikator Kinerja Utama.
2. Kegiatan Rehabilitasi Tanggul Sungai dan Pengaman Pantai dapat dimaksimalkan serta kegiatan pembentukan dan pembinaan P3A
3. Diharapkan tahun selanjutnya sudah Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan OP sudah menyentuh di kegiatan pemeliharaan sehingga IKU irigasi Baik dapat terwujud.
4. Diharapkan pada tahun selanjutnya terpenuhinya tingkat pelayanan operasional UPT Pengelolaan Sumber Daya Air
5. Diharapkan Pada Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi dan Pengaman Pantai Dapat Di Danai pada Anggaran DAK

Tujuan 2: Meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan

Sasaran 3.1 : Meningkatnya Tenaga Jasa Konstruksi

Indikator 3.1.1: Rasio tenaga operator/teknisi/analisis terampil konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi.

Indikator 3.1.2 : Rasio Proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi

1. Pengalokasian Anggaran yang maksimal terutama yang mendukung peningkatan Indikator Kinerja Utama.
2. Diharapkan Adanya pengawasan dan evaluasi tentang tertibnya penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa konstruksi di tingkat kabupaten yang maksimal.
3. Diharakan pada kegiatan pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan konstruksi.
4. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi di tingkat kabupaten.

B. Realisasi Anggaran

Pagu anggaran belanja Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi Kabupaten Bone Tahun 2021 setelah perubahan sebesar Rp. 24.001.389.521 sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel 13.1 Realisasi Anggaran

PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN		%
	TARGET	REALISASI	
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar			
Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	28,485,143,128	24,001,389,521	84.26%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Rp 11,482,643,793	Rp 10,173,705,351	88.60%
Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 295,406,900	Rp 177,539,600	60.10%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	230,666,900	148,572,500	64.41%
Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	64,740,000	28,967,100	44.74%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 10,109,732,333	Rp 9,138,799,803	90.40%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10,109,732,333	9,138,799,803	90.40%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	#DIV/0!



Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	#DIV/0!
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 396,525,265	Rp 264,656,200	66.74%
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor	Rp 2,492,915	Rp 2,422,000	97.16%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42,599,000	29,859,900	70.10%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	21,284,000	18,524,000	87.03%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	47,492,000	40,756,500	85.82%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19,999,350	12,864,700	64.33%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20,100,000	16,180,000	80.50%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	242,558,000	144,049,100	59.39%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 377,442,000	Rp 331,956,834	87.95%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	63,500,000	51,285,638	80.76%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	313,942,000	280,671,196	89.40%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 303,537,295	Rp 260,752,914	85.90%



Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	96,000,250	58,849,914	61.30%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11,570,000	6,203,000	53.61%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	195,967,045	195,700,000	99.86%
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	17,002,499,335	13,827,684,170	81.33%
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah	4,109,712,370	3,432,550,700	83.52%



Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	199,000,000		197,635,000	99.31%
Pembangunan Sumur Air Tanah Untuk Air Baku	696,700,000	Rp	691,124,000	99.20%
Rehabilitasi Tanggul Sungai	1,476,004,220		1,466,600,000	99.36%
Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	686,956,350	Rp	437,309,300	63.66%
Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	626,964,000		442,243,700	70.54%
Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) pemanfaatan SDA Ws Kewenangan Kabupaten/kota	30,725,400		14,153,600	46.06%
Koordinasi dan Sinkronisasi peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan SDA kewenangan kabupaten/kota	393,362,400	Rp	183,485,100	46.65%
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha dalam (satu) Daerah Kabupaten/kota	12,892,786,965		10,395,133,470	80.63%
Penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	300,000,000	Rp	299,552,000	99.85%
Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	2,801,757,900		1,958,276,939	69.89%



Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	8,148,433,455		6,676,126,281	81.93%
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	5,211,800	Rp	3,367,000	64.60%
Operasi Unit Pengelola Irigasi	43,740,000		34,965,000	79.94%
Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	1,593,643,810	Rp	1,422,846,250	89.28%

Sumber Data : Laporan LPDD Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi Tahun 2021



BAB IV PENUTUP

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan Umum

Laporan kinerja Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi Tahun 2021 merupakan gambaran kinerja dari Sumber Daya Air Dan Bina konstruksi, Laporan kinerja juga memuat hasil analisis dan evaluasi pencapaian kinerja sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan selama tahun 2021. Ada 3 (Tiga) sasaran strategis dan 6 (Enam) indikator yang harus dicapai oleh Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi, Secara umum Ketiga sasaran telah dicapai dengan hasil:

- (i) Sasaran 1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Tercapai dengan nilai SAKIP BB
- (ii) Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dan layanan Sumber Daya Air tercapai dengan nilai 81.33%.

Capaian dari masing-masing indikator sasaran dan program adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis1: Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi indikator Nilai SAKIP Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi bernilai BB, melalui indikator program:
 - Cakupan realisasi pelaksanaan seluruh kegiatan pendukung program penunjang urusan pemerintahan daerah yang telah direncanakan yang dicapai 88.60%
2. Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dan layanan Sumber Daya Air tercapai 1. 64.32 % ; 2. 9% ; 3. 70.22% % melalui indikator program:
 - Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota yang dicapai 64.32%
 - Persentase luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi,erosi,dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan Kab/Kota yang dicapai 9.10 %
 - Persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dicapai 70.22%



B. Kendala Pelaksanaan dan Upaya Mengatasi

Meskipun capaian pada sasaran indikator kerja utama (IKU) ini sudah optimal, namun masih tetap ada kendala pelaksanaan di lapangan antara lain kurangnya data pendukung untuk mendukung kegiatan sasaran dan indikator masih perlu ditingkatkan lagi akan tetapi pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai standar prosedur Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi kemudian masalah sosialisasi dan pembinaan P3A yang masih kurang dan Kegiatan Pemeliharaan Rutin yang belum terlaksana sesuai yang diharapkan.

Upaya yang tentunya perbaikan dan peningkatan Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi yaitu antara lain :

- a. Melakukan Pelatihan untuk peningkatan kapasitas kelembagaan konstruksi
- b. Melakukan sinkronisasi dokumen perencanaan mulai dari Renstra, Renja, RKA sampai dengan PK dengan menyiapkan SOP perencanaan dan optimalisasi program perencanaan
- c. Mengikutkan Bimtek dan Pelatihan-pelatihan bagi aparatur pejabat pengawas dan pelaksana administrasi untuk penningkatan kapasitas dan kualitas sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi guna menunjang pelaksanaan tugas yang semakin kompleks sesuai perkembangan teknologi.
- d. Membangun data dan informasi terkait dengan Indikator Kinerja Utama sehingga kinerja Dinas Sumber Daya Air lebih optimal.

Lampiran :

- 1). Matriks Renstra
- 2). Cascading Kinerja
- 3). Perjanjian Kinerja
- 4). Ringkasan Pengukuran Kinerja
- 5). Penghargaan
- 6). Inovasi
- 7). Lampiran lainnya, dll